

**PENGARUH TINGKAT KEPEMILIKAN PEMERINTAH,
DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ANTI
KORUPSI**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

FAUZAN RIZKI YULIANTAMA

2110011311063

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUNG HATTA
TAHUN 2025**

JUDUL SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI**

Oleh:

Nama: Fauzan Rizki Yuliantama

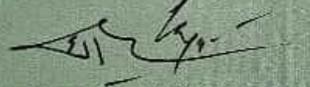
NPM: 2110011311063

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 4 September 2025

Menyetujui

Pembimbing



(Drs. Meihendri, M.Si., AK.CA)

Ketua Program Studi



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH TINGKAT KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI

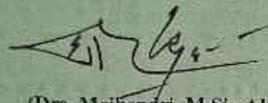
Oleh:

Nama: Fauzan Rizki Yuliantama

NPM: 2110011311063

Tim Penguji

Ketua



(Drs. Meihendri, M.Si., AK.CA)

Sekretaris



(Mukhlizul Hamdi, S.E., M.Si., Ak., CA)

Anggota



(Neva Novianti, S.E., M. Acc.)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Pada tanggal 4 September 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta



(Dr. Febrina Harahap, S.E., M.Si)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Rizki Yuliantama

NPM : 2110011311063

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Bung Hatta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kepemilikan Pemerintah, Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi”** Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebagai atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisannya. Adapun bagian bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulis ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 September 2025

Yang Menyatakan

Fauzan Rizki Yuliantama

PENGARUH TINGKAT KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI

Fauzan Rizki Yuliantama¹ , Meihendri²

^{1,2}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini terdiri dari 26 perusahaan BUMN dengan periode pengamatan 2019–2024, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Variabel dependen diukur melalui analisis konten laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan, sedangkan analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS 27 dengan metode regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Sebaliknya, dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme tata kelola dan ukuran perusahaan berperan penting dalam mendorong transparansi perusahaan BUMN.

Kata Kunci : kepemilikan pemerintah; dewan komisaris independen; ukuran perusahaan, pengungkapan anti korupsi; BUMN.

THE EFFECT OF GOVERNMENT OWNERSHIP LEVEL, INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS AND COMPANY SIZE ON ANTI-CORRUPTION DISCLOSURE

Fauzan Rizki Yuliantama¹ , Meihendri²

^{1,2} Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

Abstrac

His study aims to analyze the effect of government ownership, independent commissioners, and firm size on anti-corruption disclosure in State-Owned Enterprises (BUMN) listed on the Indonesia Stock Exchange. The research sample consists of 26 soes observed during the 2019–2024 period, selected using purposive sampling based on specific criteria. The dependent variable was measured through content analysis of annual reports and/or sustainability reports, while data analysis was conducted using SPSS 27 software with multiple linear regression at a 5% significance level.

The results show that government ownership has no significant effect on anti-corruption disclosure. In contrast, independent commissioners and firm size have a significant effect on anti-corruption disclosure. These findings emphasize that corporate governance mechanisms and firm size play an important role in enhancing transparency within BUMN.

Keyword : government ownership; independent commissioners; firm size; anti-corruption disclosure; BUMN.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Anti Korupsi”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Yuliarman, S.E dan Medjulianita, S.E atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bung Hatta Dan Ibu Dr. Listiana Sri Mulatsih, S.E., M.M., CEAP selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Neva Novianti, S.E., M. Acc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Siti Rahmi, S.E., M. Acc. Ak., CA, Selaku sekretaris prodi Akuntansi.

5. Bapak Drs. Meihendri, M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama perkuliahan.
7. Adik Kandung Penulis, Fauzi Arman Naufal & Keluarga Besar Penulis.
8. Seluruh teman-teman penulis, Habib, Daffa, Rafly, Irvan, Joan, Gandi, Saga, Abing, Naufal, Rafi, Dwi, Yozan, Fauzan atas semangat, dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Teman-Teman Akuntansi Angkatan 2021 Yang Selalu Memotivasi Untuk Bisa Menyelesaikan Skripsi Ini Dan Sebagai Teman Penulis Dalam Bertukar Pemikiran, serta semua pihak yang telah membantu serta memberikan motivasi hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya yang tertarik pada penelitian mengenai pengungkapan anti korupsi.

Padang, 5 September 2025

Fauzan Rizki Yuliantama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penulisan	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Teori Legitimasi	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Tingkat Kepemilikan Pemerintah.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Dewan Komisaris Independen	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Ukuran Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pengembangan Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Tingkat Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Populasi Dan Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Jenis Dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Variabel Dependen	Error! Bookmark not defined.
3.3.1.1 Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Variabel Independen.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Teknik Analisa Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.4.3 Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.
3.4.4 Pengujian Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Pengujian Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
4.3 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Pengaruh Tingkat Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Keterbatasan.....	Error! Bookmark not defined.
5.3 Saran Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

Lampiran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria Uji Autokorelasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Prosedur Pemilihan Sampel	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan Sampel	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi (Durbin Watson setelah Cochrane Orcut).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 11 Uji Simultan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 12 Hasil Uji T.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perusahaan Sampel	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi (Cochrane Orcut).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9 Hasil Uji Simultan.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10 Hasil Uji Parsial	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 11 Pengukuran Pengungkapan Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini kasus korupsi merupakan suatu kasus yang masih menjadi perhatian utama di belahan dunia, termasuk di Indonesia. menurut Wajdi et al. (2024) korupsi diartikan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi otoritas untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah. Definisi ini mencerminkan esensi korupsi sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi justru dimanfaatkan demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, bukan hanya pembangunan ekonomi yang terganggu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara yang terkikis secara perlahan namun pasti.

Tindakan korupsi Indonesia berdasarkan informasi yang diperoleh dari website *Transparency International* pada tahun 2024 Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 37 dan menduduki peringkat 99 dari 180 negara. Skor Indeks Persepsi Korupsi ini meningkat 3 poin dari tahun 2023 lalu, menunjukkan bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan hasil yang positif (Deputi *Transparency International* Indonesia - Wawan Suyatmiko, 2025). Namun pada tingkat kenaikan poin dapat terbilang rendah atau cukup lamban, mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat kasus korupsi di Indonesia.

Skor tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Skor ini juga masih berada di bawah rata-rata global, yaitu 43, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas pemberantasan korupsi di Indonesia masih tergolong rendah.

Di tingkat Asia, ketimpangan dalam skor IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sangat mencolok. Negara-negara seperti Singapura (84), Jepang (73), dan Korea Selatan (63) menunjukkan tata kelola yang relatif bersih dan sistem hukum yang kuat. Sebaliknya, negara-negara seperti Myanmar (16), Afghanistan (16), dan Korea Utara (15) berada di posisi terbawah, mencerminkan lemahnya institusi dan tingginya konflik politik. Dalam konteks ini, Indonesia berada di posisi menengah bawah, menunjukkan bahwa tantangan korupsi masih bersifat struktural dan belum sepenuhnya teratasi.

Pada kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-5 dari 10 negara yang dinilai. Negara-negara dengan skor lebih tinggi antara lain Singapura (84), Malaysia (50), Timor Leste (44), dan Vietnam (40). Indonesia dengan skor (37) berhasil melampaui Thailand (34), Laos (33), dan Filipina (33), namun masih jauh dari posisi ideal. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan skor, Indonesia belum mampu mengejar negara-negara tetangga yang lebih progresif dalam reformasi antikorupsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis skor indeks perilaku anti korupsi (IPAK) pada tahun 2024 yang memperoleh skor 3,85 dari skala 5, dimana skor tersebut turun sekitar 0,7 dari tahun 2023. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di

Indonesia saat ini tidak hanya terjadi di korporasi dengan kepemilikan swasta namun juga terjadi di korporasi yang dimiliki oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di tangan pemerintah. Dalam konteks perannya, BUMN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, BUMN juga diharapkan dapat menjadi teladan bagi sektor swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa BUMN tidak sepenuhnya bebas dari permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi *Anti-Corruption Clearing House* (acch.kpk.go.id), tercatat bahwa sejumlah kasus tindak pidana korupsi justru melibatkan instansi BUMN. Temuan ini mencerminkan bahwa praktik penyimpangan, termasuk fraud, masih terjadi dalam lingkungan perusahaan BUMN dan menimbulkan tantangan serius bagi upaya penguatan integritas di sektor publik.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan berbagai badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta transparansi tata kelola perusahaan. Pada Februari 2025 Salah satu kasus besar terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Modus utama yang dilakukan melibatkan pengoplosan

bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) di fasilitas penyimpanan (*depo/storage*), kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat dugaan manipulasi data impor BBM, di mana BBM RON 90 dilaporkan sebagai RON 92, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran subsidi oleh negara. Praktik penggunaan metode pembayaran spot dalam pembelian minyak mentah dan BBM, yang seharusnya dilakukan melalui kontrak jangka panjang, turut menambah kerugian akibat potensi *mark-up* harga. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan teknis, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara (Octavia & Carina,2025).

Pada tahun 2024 Kasus besar juga terungkap di PT Timah dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Beberapa perusahaan swasta diduga melakukan penambangan timah secara ilegal di area konsesi milik PT Timah, dengan dukungan dari oknum pejabat internal perusahaan. Bijih timah hasil tambang ilegal tersebut kemudian dijual kepada perusahaan swasta melalui perantara, dan akhirnya dijual kembali ke PT Timah seolah-olah berasal dari sumber resmi (Hafiez,2024).

Pada September 2024 di sektor farmasi, PT Indofarma Tbk menghadapi permasalahan serius terkait dugaan manipulasi laporan keuangan dan transaksi fiktif, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp370 miliar. Berdasarkan audit independen, ditemukan bahwa manajemen perusahaan melakukan pencatatan palsu atas transaksi penjualan dan piutang, termasuk pembayaran uang muka untuk pembelian alat kesehatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Anak perusahaan

PT Indofarma, yakni PT Indofarma Global Medika (IGM), menjual produk kepada perusahaan terafiliasi yang tidak memiliki kapasitas keuangan untuk membayar. Produk-produk tersebut kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan baru yang minim pengalaman, sehingga menimbulkan potensi risiko lanjutan dalam distribusi dan keberlanjutan operasional (Victoria,2024).

Beberapa upaya untuk memerangi korupsi telah dilakukan secara menyeluruh, salah satunya melalui peningkatan transparansi dan pengungkapan informasi terkait aktivitas anti korupsi. Pada saat ini di Indonesia, komitmen terhadap pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penerapan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian, tantangan dalam hal implementasi, transparansi, dan pengawasan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pengungkapan anti korupsi menjadi instrumen penting dalam menciptakan akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan dunia usaha.

Menurut Hartomo et al. (2019) di tengah upaya pemberantasan korupsi, peran korporasi atau perusahaan sebenarnya cukup dilematis. Di satu sisi, mereka bisa terlibat dalam praktik korupsi, misalnya melalui suap atau kolusi. Namun di sisi lain, perusahaan juga punya potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi. Kesadaran dan komitmen perusahaan dalam melawan korupsi dapat terlihat dari berbagai langkah yang mereka ambil, salah satunya melalui transparansi dalam bentuk pengungkapan kebijakan anti korupsi yang disampaikan dalam laporan

tahunan. Pengungkapan ini menjadi indikator penting yang menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam mencegah, mengawasi, dan menindak praktik korupsi di lingkungan mereka. Studi yang dilakukan oleh Mulyono & Raharja (2023) menyebutkan bahwa pengungkapan kebijakan anti korupsi mencerminkan transparansi dan komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik. Pengungkapan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Pengungkapan anti korupsi didefinisikan oleh *Global Report Initiative* atau GRI di dalam standar GRI 205 sebagai proses pelaporan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mencegah dan menangani korupsi dalam seluruh aktivitasnya. GRI memandang korupsi sebagai isu material yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi dan berdampak pada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelanggan, mitra usaha, dan pemerintah (Global Report Initiative, 2016). GRI mengungkapkan 3 komponen di dalam GRI 205 yaitu : *Operations assessed for risks related to corruption* (GRI 205-1), *Communication and training about anti-corruption policies and procedures* (GRI 205-2) dan *Confirmed incidents of corruption and actions taken* (GRI 205-3).

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Zulfani et al. (2024) yang meneliti tingkat kepemilikan pemerintah, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi menemukan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah,

kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Previtali & Cerchiello (2023a) yang meneliti dewan komisaris independen, keberagaman gender dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan anti korupsi menemukan bahwa dewan komisaris independen, keberagaman gender dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap terhadap pengungkapan anti korupsi.

Pada penelitian Faisal et al. (2022) yang meneliti kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan tipe industri terhadap pengungkapan anti korupsi menemukan bahwa kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Penelitian Hartomo & Hutomo (2020) yang meneliti kepemilikan pemerintah, ukuran dewan komisaris, keberagaman gender dewan komisaris dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan anti korupsi menemukan bahwa kepemilikan pemerintah, ukuran dewan komisaris, keberagaman gender dewan komisaris dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Dari hasil uraian penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan anti korupsi, Yaitu: Kepemilikan pemerintah, Ukuran Perusahaan, kepemilikan asing, dewan komisaris independen, keberagaman gender dewan komisaris, kualitas audit dan tipe industri. Dari beberapa faktor tersebut mengingat keterbatasan waktu dan sarana penelitian, peneliti membatasi menjadi 3 variabel independen, dan 1 variabel dependen, yaitu

tingkat kepemilikan pemerintah, dewan komisaris independent dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, Pengungkapan anti korupsi sebagai variabel dependen.

Faktor pertama adalah tingkat kepemilikan pemerintah, Tingkat kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejauh mana perusahaan tersebut mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Hal ini berkaitan erat dengan tingginya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas dan integritas dari institusi yang mengelola sumber daya negara. Masyarakat, sebagai pemilik tidak langsung dari perusahaan-perusahaan tersebut, menuntut adanya transparansi dan keterbukaan, termasuk dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi (Jannah & Adhariani, 2021).

Menurut Faisal et al. (2022), perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan negara menggunakan pengungkapan ini untuk menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai integritas dan tata kelola yang baik, sekaligus menjaga reputasi mereka di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, tindakan tersebut bukan hanya dilandasi oleh regulasi, tetapi juga menjadi keharusan bagi perusahaan untuk mempertahankan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Widya Zulfani et al. (2024) yang menemukan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Graciella et al. (2023) tingkat kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan anti korupsi adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan salah satu komponen utama dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Keberadaan mereka penting karena independensi memungkinkan mereka untuk bertindak secara objektif, bebas dari tekanan internal, serta tidak memiliki kepentingan langsung dalam operasional perusahaan (Digdo Hartomo et al., 2019) Oleh karena itu, mereka memiliki posisi yang ideal untuk mendorong keterbukaan, termasuk dalam hal pengungkapan kebijakan anti korupsi.

Penelitian oleh Hartomo & Hutomo (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Penelitian ini menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki kecenderungan untuk mendorong manajemen agar menyediakan informasi yang relevan kepada investor, termasuk informasi mengenai kebijakan antikorupsi sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan legitimasi sosial perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Previtali & Cerchiello (2023), Rissdiana & Riduwan (2023), yang menemukan bahwa dewan komisaris independent berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian Graciella et al. (2023), Faisal et al. (2022) yang menemukan bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Faktor terakhir yang mempengaruhi pengungkapan anti korupsi adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat pengungkapan kebijakan anti korupsi. Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki kompleksitas operasional yang lebih tinggi, sumber daya manusia dan finansial yang lebih kuat, serta pengawasan publik yang lebih besar. Faktor-faktor ini mendorong perusahaan besar untuk lebih proaktif dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan antikorupsi.

Menurut Widya Zulfani et al. (2024), perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi secara lebih menyeluruh karena mereka memiliki kapasitas pelaporan yang lebih baik, termasuk dalam hal sistem pengendalian internal dan pelaporan keberlanjutan. Selain itu, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik dan media, sehingga mereka terdorong untuk menjaga citra dan reputasi institusional melalui transparansi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rissdiana & Riduwan (2023) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghazwani et al. (2024) yang menemukan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Karena variasi dalam beberapa penelitian sebelumnya serta Pemaparan fenomena yang mendukung dan menjadi latar belakang penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Tingkat Kepemilikan Pemerintah, Dewan Komisaris Independent Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi ?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dilakukan penelitian ini untuk menguji bukti empiris tentang :

1. Pengaruh tingkat kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan anti korupsi.
2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan anti korupsi.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam ranah tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengungkapan non-keuangan. Penelitian ini akan menambah referensi akademik terkait determinan pengungkapan kebijakan anti korupsi, dengan menyoroti peran struktur kepemilikan, dewan pengawas independen, serta ukuran perusahaan sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi tingkat keterbukaan perusahaan dalam mengelola isu integritas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan, khususnya perusahaan milik negara (BUMN), dalam menyusun dan meningkatkan strategi pengungkapan kebijakan anti korupsi. Dengan memahami pengaruh tingkat kepemilikan pemerintah, keberadaan komisaris independen, serta skala perusahaan, manajemen dapat merancang kebijakan tata kelola yang lebih akuntabel dan mendorong praktik bisnis yang transparan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilaksanakan saat ini terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Uraian sub bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Menjelaskan informasi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan, penelitian-penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta kerangka konseptual penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan variabel penelitian, teknik analisis data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.

